

ABSTRAK PERATURAN

PERJANJIAN INTERNASIONAL - PAJAK PENGHASILAN - PERUBAHAN

2017

PERMENKEU RI NOMOR 6/PMK.010/2017 TANGGAL 26 JANUARI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 157 /PMK.010/2015 TENTANG PELAKSANAAN PERLAKUAN PAJAK PENGHASILAN YANG DIDASARKAN PADA KETENTUAN DALAM PERJANJIAN INTERNASIONAL.

ABSTRAK : - bahwa sehubungan dengan adanya amandemen terhadap Harmonized System (HS) 2012 menjadi Harmonized System (HS) 2017 dan Revisi ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2012 menjadi ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2017, perlu melakukan perubahan terhadap sistem klasifikasi barang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.011/2011 tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.010/2016;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 7 Tahun 1994 (LN Tahun 1994 No. 57, TLN No. 3654); UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur mengenai penetapan sistem klasifikasi barang impor yang tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Peraturan Menteri ini. Ketentuan dalam Peraturan Menteri ini berlaku terhadap barang impor yang dokumen pemberitahuan pabean impornya telah mendapatkan nomor dan tanggal pendaftaran dari Kantor Pabean tempat dipenuhinya kewajiban pabean sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 1 Maret 2017.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 26 Januari 2017 dan diundangkan pada tanggal 27 Januari 2017.

- Peraturan Menteri ini Mencabut 132/PMK.010/2015

- Peraturan Menteri ini Mencabut 133/PMK.010/2013

- Peraturan Menteri ini Mencabut 134/PMK.010/2016

- Peraturan Menteri ini Mencabut 213/PMK.010/2011

- Peraturan Menteri ini Mencabut 35/PMK.010/2016

- Peraturan Menteri ini Mencabut 97/PMK.010/2015